Sengketa Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi

Oleh:

Okky Putra Agustyan

5170121001

Diterbitkannya suatu ketetapan pajak menimbulkan permasalahan yang cukup krusial antara wajib pajak dan petugas pajak dikarenakan perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan petugas pajak dalam menentukan besarnya pajak,hal tersebut menyebabkan wajib pajak mengajukan keberatan apabila merasa kurang atau tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaporkan dan membayar pajak menyebabkan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Permasalahan dalam penelitian : bertujuan untuk mengetahui cara keberatan wajib pajak kepada KPP Pratama dan bermaksut untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa wajib pajak kepada KPP Pratama. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris. Jenis data yaitu data Primer dan data Sekunder yang dikumpulkan dengan wawancara. Hasil dari penelitian menunjukkan: Bahwa dalam mengajukan keberatan sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atas dikeluarkannya SKPKB oleh pihak KPP maka wajib pajak memberikan data-data untuk mendukung dalam hal permohonan keberatan tersebut. Sehingga dalam pengajuan tersebut pihak KPP menerima dan mengoreksi data-data dan pihak KPP mengabulkan permohonan keberatan atas ketetapan pajak yang diberikan oleh wajib pajak. Jadi wajib pajak tidak dikenakan ketetapan pajak dan tidak melaporkan SPT di dalam negeri.

Kata kunci: Sengketa Pajak WPOP Luar Negeri

*Tax Dispute On Individual Tax Payers*

*Okky Putra Agustyan*

*5170121001*

*The issuance of a tax assessment raises quite crucial problems between taxpayers and tax officers due to differences of opinion between taxpayers and tax officers in determining the amount of tax, this causes taxpayers to object if they feel less or dissatisfied with a tax assessment imposed on him according with Law Number 16 of 2009 concerning General Provisions and Tax Procedures. Lack of public awareness and compliance in reporting and paying taxes causes taxpayers to be subject to administrative sanctions in the form of fines. This study: aims to find out how the taxpayer objected to KPP Pratama and bermaksut to find out the taxpayer's dispute resolution process to the KPP Primary. This study uses normative and empirical legal approaches. Types of data are Primary data and Secondary data collected by interview. The results of the research show: Whereas in filing an objection in accordance with the General Provisions and Tax Procedures for the issuance of the SKPKB by the KPP, the taxpayer provides data to support in the case of the objection request. So that in the filing the KPP received and corrected the data and the KPP granted an objection request for the tax provisions provided by the taxpayer. So taxpayers are not subject to tax assessments and do not report domestic tax returns.*

*Keywords: Overseas WPOP tax dispute*